



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Senin, 21 Juli 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

FBPD Sidoarjo Peringati Harlah Ke-8 Tahun dengan Tumpengan

Sidoarjo Memorandum

Tidak terasa sudah usia 8 tahun Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) Sidoarjo. Hari lahir (harlah) yang jatuh tepat pada 17 Juli diperingati sederhana dengan tumpengan dan hiburan. Dihadiri perwakilan pengurus FBPD kecamatan se-Sidoarjo, LBH LSM LIRA Sidoarjo, dan Bupati LSM LIRA Sidoarjo Winarno atau akrab disapa Mas Win.

Ketua FBPD Sidoarjo Sigit Setiawan dalam sambutannya, berharap lembaganya terus eksis membantu desa dan program pemerintah kabupaten. "Dengan adanya FBPD, lanjutnya, semoga bisa menghasilkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Perlu diingat, FBPD masih eksis di desa-desa, sehingga kita tidak salah tiap tahun mengadakan kegiatan



Peringatan Harlah ke-8 FBPD Sidoarjo.

harlah," jelasnya dalam acara yang berlangsung Jumat (18/7) malam itu.

Di harlah tahun ini, Sigit berharap FBPD selalu memberikan manfaat untuk pembangunan sesuai visi misi kepala desa (kades) dan pemerintahan

kabupaten (pemkab). Termasuk merespons dinamika dengan organisasi lain. "Itu biasa-biasa saja, namanya demokrasi, dengan adanya organisasi lain, intinya sama tujuannya, membuat Sidoarjo lebih baik," paparnya. Karena itu, memasuki usia 8

tahun, FBPD harus lebih giat dan tetap bersemangat membangun pemerintah desa sehingga bisa membawa manfaat masyarakat. "Membuat suatu hal yang positif untuk desa. Itu harapan kami sebagai ketua FBPD Sidoarjo," pungkasnya. (sud/san/ep)

Lima Pasar Tradisional Diperbaiki mulai Agustus sampai Desember

SIDOARJO - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo akan merehabilitasi lima pasar tradisional tahun ini. Yakni Pasar Gedangan, Pasar Taman, Pasar Wadugastri, Pasar Prambon, dan Pasar Bulang.

Kabid Pasar Disperindag Sidoarjo Sultan Hasan mengatakan, hanya rehabilitasi ringan dan pemeliharaan.

"Tidak ada rehab total, hanya perbaikan fasilitas," ujarnya kemarin (20/7).

Rehab pasar akan menggunakan anggaran dari APBD 2025 dengan nilai bervariasi antara Rp 499 juta hingga Rp 699 juta. Tergantung kebutuhan perbaikannya. Pekerjaan direncanakan antara Agustus hingga September 2025. Tuntas pengerjaan pada Desember.

"Kami akan benahi seperti atap, drainase, kios, dan sarana umum lainnya. Parkir juga," jelasnya. Dari lima proyek tersebut, nilai tertinggi tercatat untuk rehabilitasi Pasar Prambon, yakni sebesar Rp 699,9 juta. "Saat ini, semua paket masih dalam proses evaluasi administrasi, dan kualifikasi," katanya. (eza/uzi)



MASUK LELANG REHABILITASI: Suasana di Pasar Gedangan, kemarin (20/7). Pasar tersebut akan diperbaiki mulai akhir Agustus mendatang.

Koperasi Merah Putih Jangan Matikan UMKM



TINGKATKAN PELAYANAN: Lokasi pembangunan RSUD Sedati berdampingan dengan Puskesmas Sedati.

Si Kesiapan g Jabon

produk UMKM lokal," ujar Khoifah. Koperasi Merah Putih Desa Kupang disebut sebagai salah satu koperasi yang paling siap menjelang peluncuran resmi. Khoifah menilai sinergi antara koperasi, Bulog, PT Pos Indonesia, dan BRI sangat penting dalam membangun ekosistem ekonomi desa.

"Model kemitraan seperti ini bisa menjadi percontohan nasional. Bulog sudah mendistribusikan beras, gula, dan minyak goreng dengan harga di bawah HET. Ini bisa dibeli oleh pelaku toko kelontong di sekitar koperasi. Bukan saling bersaing, tapi saling mendukung," jelasnya.

Meskipun tidak termasuk dalam sembilan koperasi yang akan diresmikan langsung oleh Presiden, koperasi di Desa Kupang tetap akan menjalankan fungsinya secara penuh.

"Yang penting adalah menjaga suasana keutuhan. Jangan sampai UMKM merasa terasing. Saya melihat pengurus koperasi di Kupang sangat bijak membangun hubungan dengan



Gubernur Jawa Timur Khoifah Indar Parawansa meninjau salah satu koperasi percontohan di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu, (19/7/25).

toko-toko sekitar," imbuhnya. Khoifah juga menekankan pentingnya fasilitas pendukung seperti gudang dan sistem administrasi yang sesuai standar Bulog.

Di akhir kunjungannya, Khoifah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, termasuk BRI, Bulog, PT Pos Indonesia, serta pengurus koperasi setempat. Ia juga menyebutkan bahwa PT Pos ke depan akan

memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa.

"Visi besar Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi dari desa harus kita dukung bersama. Koperasi adalah ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa," pungkasnya. (kri/san)

membuka gerai-gerai koperasi desa untuk memperkuat distribusi pangan murah ke masyarakat.

Bangun RSUD Sedati, Target Rampung Akhir 2025

SEDATI-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memulai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati dalam waktu dekat. Fasilitas kesehatan baru ini akan dibangun di bekas lahan Puskesmas Sedati lama, tepat di belakang gedung puskesmas yang masih aktif saat ini.

RSUD Sedati dirancang sebagai rumah

sakit kelas D, dengan target penyelesaian pada Desember 2025. Saat ini, proses konstruksi telah memasuki tahap awal.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakshmie Herawati Yuwantina, menjelaskan bahwa kontrak kerja dengan pelaksana proyek telah ditandatangani pada pertengahan Juli lalu.

● Ke Halaman 10

Tepis Kabar Sakit Keras, Wabup Kerja Bakti Bersama Pelajar

Sidoarjo, Memorandum Wakil Bupati (Wabup) imik Idayana, kerja bakti bersama pelajar SMA Negeri 2 Sidoarjo, DLHK, serta tpol PP Sidoarjo di Taman yang, Perumahan Gading jar, Sabtu (19/7). Kehadiran wabup sekaligus menghantar kabar sakit keras yang lerita.

Kerja bakti yang dilakukan fokus pada pembersihan rong-gorong yang tersum-t sampah. Wabup menyampaikan, ini upaya untuk enumbuhkan kesadaran erisihan kepada generasi uda, khususnya generasi Z. "Melalui kegiatan sepi ini, kami ingin menumhkan rasa cinta terhadap bersihn pada generasi ida. Kebersihan bukan ha-tanggung jawab pemer-



Wabup Mimik Idayana tak segan turun langsung menginstruksikan titik yang perlu ditangani ketika kerja bakti bersama pelajar SMAN 2 Sidoarjo.

intah, tetapi juga tanggung jawab kita semua, terutama generasi penerus bangsa," ujarnya.

Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan PKL lokasi yang diimbau untuk turut menjaga kebersihan dengan tidak membuang

sampah sembarangan. "Kami juga akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menata kembali keberadaan PKL di kawasan ini agar lebih rapi dan tidak mengganggu drainase serta keindahan lingkungan," tuturnya. (kri/san)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Edukasi Ketahanan Pangan Usia Dini

Polisi Ajari Siswa SDN Wonokarang Menanam Sayur

Sidoarjo, Memorandum

Mengenalkan program ketahanan pangan sejak dini, Bhabinkamtibmas Polsek Balongbendo Aipda Djunaidi Hamami mengajarkan cara menanam sayur kepada siswa SDN Wonokarang. Kegiatan itu berlangsung di lahan pekarangan pangan bergizi (P2B) milik sekolah yang dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran praktik bercocok tanam.

Aipda Djunaidi Hamami tak lupa memberikan penjelasan tentang pentingnya ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan sendiri. "Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai cinta lingkungan dan kemandirian sejak dini, serta memperkenalkan pentingnya pola hidup sehat melalui konsumsi sayuran hasil tanam sendiri," ujar Aipda Djunaidi Hamami.

Ia berharap, para siswa tidak hanya memahami pentingnya

ketahanan pangan, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar sekolah.

Program ini juga merupakan bentuk sinergi antara Polri dan lembaga pendidikan yang digagas Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing dalam mencetak generasi yang peduli terhadap ketahanan pangan dan lingkungan hidup.(sud/san/epe)



Personel Polsek Balongbendo mengawasi edukasi ketahanan pangan yang dilakukan siswa SDN Wonokarang.

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

FBPD Sidoarjo Peringati Harlah Ke-8 Tahun dengan Tumpengan

Sidoarjo Memorandum

Tidak terasa sudah usia 8 tahun Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) Sidoarjo. Hari lahir (harlah) yang jatuh tepat pada 17 Juli diperingati sederhana dengan tumpengan dan hiburan. Dihadiri perwakilan pengurus FBPD kecamatan se-Sidoarjo, LBH LSM LIRA Sidoarjo, dan Bupati LSM LIRA Sidoarjo Winarno atau akrab disapa Mas Win.

Ketua FBPD Sidoarjo Sigit Setiawan dalam sambutannya, berharap lembaganya terus eksis membantu desa dan program pemerintah kabupaten. "Dengan adanya FBPD, lanjutnya, semoga bisa menghasilkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Perlu diingat, FBPD masih eksis di desa-desa, sehingga kita tidak salah tiap tahun mengadakan kegiatan



Peringatan Harlah ke-8 FBPD Sidoarjo.

harlah," jelasnya dalam acara yang berlangsung Jumat (18/7) malam itu.

Di harlah tahun ini, Sigit berharap BPD selalu memberikan manfaat untuk pembangunan sesuai visi misi kepala desa (kades) dan pemerintahan

kabupaten (pemkab). Termasuk merespons dinamika dengan organisasi lain. "Itu biasa-biasa saja, namanya demokrasi, dengan adanya organisasi lain, intinya sama tujuannya, membuat Sidoarjo lebih baik," paparnya.

Karena itu, memasuki usia 8

tahun, FBPD harus lebih giat dan tetap bersemangat membangun pemerintah desa sehingga bisa membawa manfaat masyarakat. "Membuat suatu hal yang positif untuk desa. Itu harapan kami sebagai ketua FBPD Sidoarjo," pungkasnya. (sud/san/epe)

MEMORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

V Tepis Kabar Sakit Keras, Wabup Kerja Bakti Bersama Pelajar

Sidoarjo, Memorandum

Wakil Bupati (Wabup) Mimik Idayana, kerja bakti bersama pelajar SMA Negeri 2 Sidoarjo, DLHK, serta Satpol PP Sidoarjo di Taman Pinang, Perumahan Gading Fajar, Sabtu (19/7). Kehadiran wabup sekaligus membantah kabar sakit keras yang diderita.

Kerja bakti yang dilakukan fokus pada pembersihan gorong-gorong yang tersumbat sampah. Wabup menyampaikan, ini upaya untuk menumbuhkan kesadaran kebersihan kepada generasi muda, khususnya generasi Z.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menumbuhkan rasa cinta terhadap kebersihan pada generasi muda. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemer-



Wabup Mimik Idayana tak segan turun langsung menginstruksikan titik yang perlu ditangani ketika kerja bakti bersama pelajar SMAN 2 Sidoarjo.

intah, tetapi juga tanggung jawab kita semua, terutama generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan PKL lokasi yang diimbau untuk turut menjaga kebersihan dengan tidak membuang

sampah sembarangan. “Kami juga akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menata kembali keberadaan PKL di kawasan ini agar lebih rapi dan tidak mengganggu drainase serta keindahan lingkungan,” tuturnya. (kri/san)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Beli Tanah Kavling, Tak Berprogress, Kepala Perkim Tak Keluarkan Izin

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Ratusan pembeli tanah kavling, menjadi korban dugaan penipuan jual beli tanah kavling pengembang PT Makmur Tentrang Berprestasi (MTB) Property. Proyek tanah kavling bertajuk Mutiara Alas Tipis di Dusun Alas Tipis, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, hingga kini tak menunjukkan progres meski telah dipasarkan sejak 2022.

Salah satu korban, Dana Abdillah, warga Gedangan, mengaku membeli dua kavling tanah masing-masing seluas 5x10 meter seharga Rp 145 juta per unit. Ia tertarik karena ditawari harga miring, hanya Rp 3 juta per meter persegi, dan skema cicilan inhouse.

“Saya sudah nyicil 15 bulan, perbulannya Rp 3,9 juta. Tapi di lokasi tidak ada pengurukan atau progres, padahal yang dijanjikan dalam jual beli tanah kavling tersebut adalah tanah siap bangun,” keluh Dana, Minggu (20/7).

Ia akhirnya membatalkan pembelian dan menandatangani perjanjian refund 60 persen dari total pembayaran. Namun, janji pengembalian uang tak kunjung terealisasi. “Kami cuma dijanjikan refund bertahap mulai Mei 2025. Baru dijanjikan Rp 10 juta. Sampai sekarang belum dibayar,” imbuhnya.

Senada disampaikan Hendra Sabiantara, warga Gedangan lainnya. Ia juga membeli tanah kavling dari PT MTB Property setelah melihat brosur promosi dan klaim legalitas lahan. “Mereka bilang tanah sudah dibeli dan tunjukkan SK Gubernur. Tapi waktu saya tanya soal sertifikat, katanya masih proses di BPN,” untkannya.

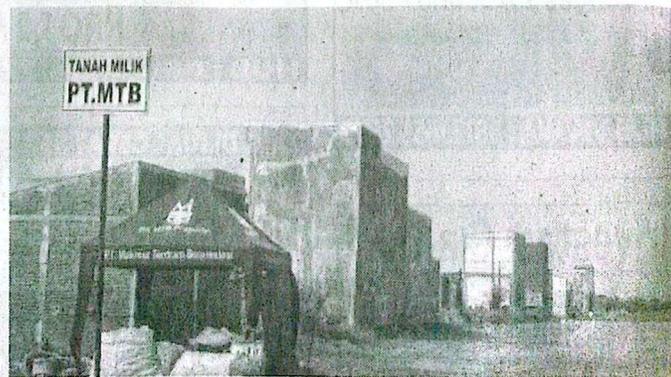
Setelah menyelidiki, Hendra mendapati fakta mengejutkan. Dari pengecekan ke Desa Pabean, diketahui bahwa tanah tersebut belum lunas dibayar oleh PT MTB Property kepada ahli waris, bahkan belum atas nama perusahaan.

“Tanah kavling yang dijual kepada kami belum atas nama PT MTB Property. Jadi di sana terdiri dari tiga ancer, yang sudah beres hanya satu, sedangkan dua ancer masih belum lunas dibayar pada ahli waris,” tambahnya.

Direktur Utama PT MTB Property, Kurniawan Yuda Soesanto, membantah keras bahwa proyeknya mangkrak.

Namun saat ditanya soal status kepemilikan lahan, Yuda mengakui bahwa hingga saat ini, tanah tersebut belum dibalik nama ke PT MTB.

Namun pernyataan Yuda justru dibantah oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo, Mochamad Bachruni Aryawan menegaskan, Pemkab Sidoarjo sudah tidak lagi mengeluarkan izin usaha jual beli tanah kavling sejak tahun 2020. “Kalau untuk kavlingan, kita nggak pernah ada keluarkan izin, terutama setelah tahun 2020 ke atas,” tegasnya. (cat/rus)



Tanah Kavling di Dusun Alas Tipis, Desa Pabean, Sedati, Sidoarjo, tak ada progress.

Koperasi Merah Putih Jangan Matikan UMKM

Gubernur Tinjau Kesiapan di Desa Kupang Jabon

SIDOARJO - Menjelang peluncuran nasional program Koperasi Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung kesiapan salah satu koperasi percontohan di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu sore, (19/7/25).

Dalam kunjungannya, Khofifah didampingi perwakilan Bulog Jatim, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim M. Mahmud, Kepala Disperindag Sidoarjo Widiyantoro Basuki, serta Kepala Desa Kupang, Mukhammad.

Gubernur Khofifah mengapresiasi kesiapan koperasi tersebut, seraya mengingatkan agar keberadaan Koperasi Merah Putih tidak mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah lebih dulu ada di desa.

"Koperasi Merah Putih jangan sampai jadi kompetitor UMKM. Justru harus menjadi mitra strategis, bahkan distributor bagi produk

produk UMKM lokal," ujar Khofifah. Koperasi Merah Putih Desa Kupang disebut sebagai salah satu koperasi yang paling siap menjelang peluncuran resmi. Khofifah menilai sinergi antara koperasi, Bulog, PT Pos Indonesia, dan BRI sangat penting dalam membangun ekosistem ekonomi desa.

"Model kemitraan seperti ini bisa menjadi percontohan nasional. Bulog sudah mendistribusikan beras, gula, dan minyak goreng dengan harga di bawah HET. Ini bisa dibeli oleh pelaku toko kelontong di sekitar koperasi. Bukan saling bersaing, tapi saling mendukung," jelasnya.

Meskipun tidak termasuk dalam sembilan koperasi yang akan diresmikan langsung oleh Presiden, koperasi di Desa Kupang tetap akan menjalankan fungsinya secara penuh.

"Yang penting adalah menjaga suasana kemitraan. Jangan sampai UMKM merasa tersisih. Saya melihat pengurus koperasi di Kupang sangat bijak membangun hubungan dengan



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau salah satu koperasi percontohan di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu, (19/7/25).

toko-toko sekitar," imbuhnya.

Khofifah juga menekankan pentingnya fasilitas pendukung seperti gudang dan sistem administrasi yang sesuai standar Bulog. Ia memastikan pelatihan dan pendampingan akan terus dilakukan agar koperasi benar-benar siap menjalankan peran strategis dalam

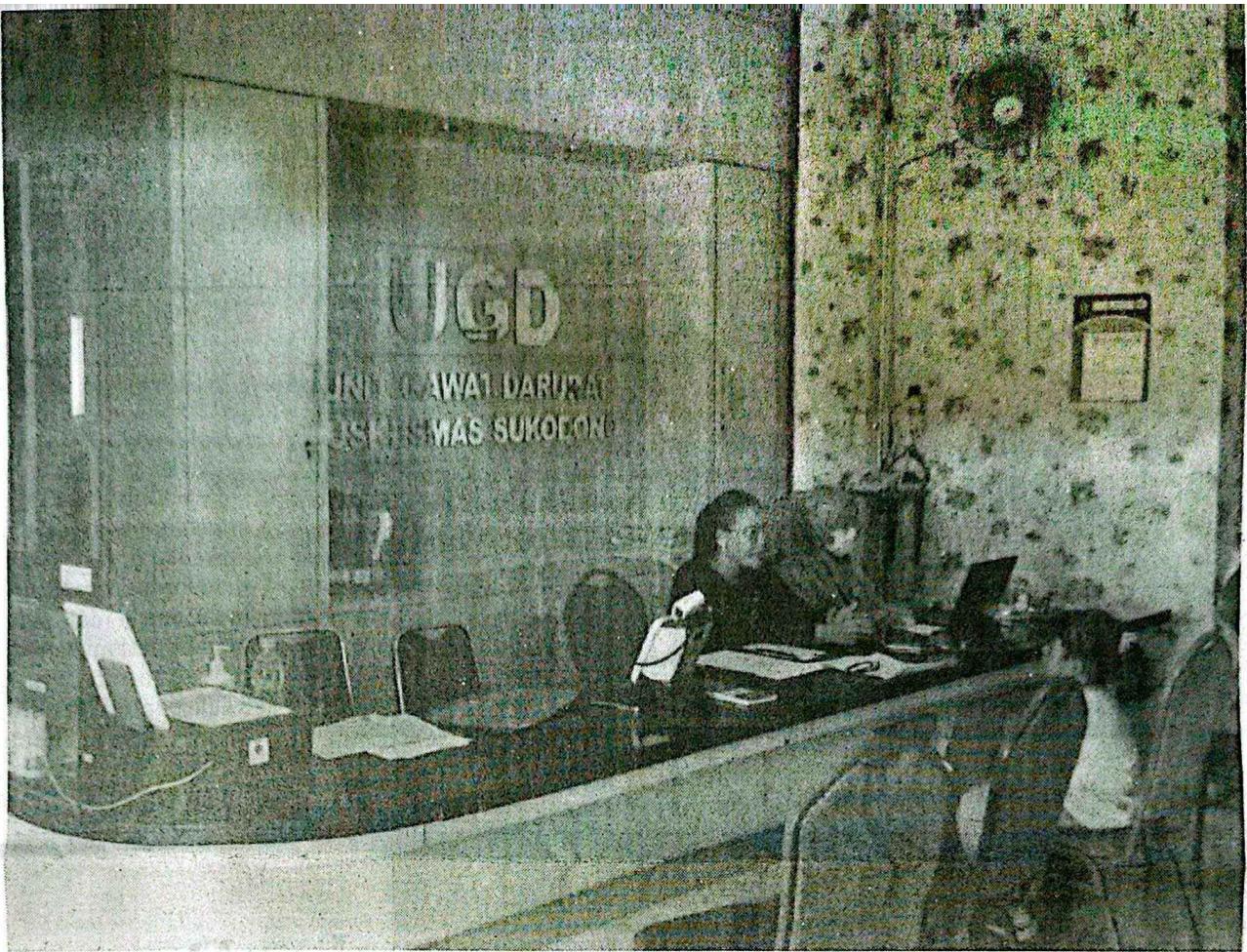
memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa.

Di akhir kunjungannya, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, termasuk BRI, Bulog, PT Pos Indonesia, serta pengurus koperasi setempat. Ia juga menyebutkan bahwa PT Pos ke depan akan

membuka gerai-gerai koperasi desa untuk memperkuat distribusi pangan murah ke masyarakat.

"Visi besar Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi dari desa harus kita dukung bersama. Koperasi adalah ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa," pungkasnya. ●Loe

DUTA



Dokter UGD Puskesmas Sukodono dalam memberikan penanganan, Jumat (18/7/25)

LOETFI/DUTA

Puskesmas Tanggap Tangani Pasien DBD

SIDOARJO - Pelayanan sigap Puskesmas Sukodono kembali mendapat apresiasi dari warga. Tim dokter dan tenaga kesehatan (nakes) dengan cepat menyarankan pemeriksaan laboratorium begitu pasien datang dengan kondisi lemas, pusing, dan demam tinggi. Hasilnya, pasien atas nama Iqbal (21) dinyatakan positif demam berdarah dan langsung disarankan untuk menjalani rawat inap.

Loetfi, yang mengantarkan pasien ke Puskesmas Sukodono Jumat (18/7/25) siang, mengaku sempat bingung karena ini adalah pengalaman pertama ke poli Ispa mengantarkan si kecil adik dari Iqbal, yang sebelumnya melalui loket pendaftaran. Namun, proses berjalan lancar berkat bantuan sigap dari dua perawat jaga Bu Nur Azizah dan Bu Purwanti Heny.

Ia mendampingi hingga proses pemeriksaan di Unit Gawat Daru-

rat (UGD) dan memberikan obat pada sang kakak yang harus rawat inap.

Dokter jaga UGD, dr. Dinar Mustika, mengatakan bahwa pasien datang dalam kondisi lemas, pusing, nyeri, dan demam tinggi. "Kami langsung menyarankan pasien berbaring di bed UGD untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes laboratorium," terang dr. Dinar biasa disapa.

Menurutnya, hasil triase menunjukkan pasien masih dalam kategori aman (zona hijau), namun secara kondisi fisik terlihat lemah dan butuh penanganan segera dan harus rawat inap.

Terpisah ditemui Duta Masyarakat, Minggu (20/7/25) orang tua pasien, Dian, menyampaikan terima kasih atas kesigapan tim medis. Ia menyebut dr. Dinar (dokter jaga)UGD, dan tenaga kesehatan (perawat) Bu

Nur Azizah dan Bu Purwanti Heny khususnya, sebagai tenaga kesehatan yang tanggap dan penuh perhatian.

"Alhamdulillah, anak saya langsung ditangani dengan cepat dan disarankan rawat inap setelah keluar hasil laboratorium. Terima kasih atas pelayanan UGD Puskesmas Sukodono yang cekatan dan penuh empati," ujar Dian.

Masih kata Dian, Minggu pagi anak saya diijinkan pulang karena sudah menjalani rawat inap selama tiga hari dan kondisinya sudah membaik.

"Alhamdulillah, sudah bisa pulang dan anak saya bisa istirahat dirumah dan berkumpul bersama adiknya yang juga usai rawat inap di Puskesmas Wonoayu," ungkap Dian.

Ia berharap pelayanan serupa juga diterapkan di seluruh puskesmas lain di Sidoarjo. • **Loe**



M SAIFUL RÖHMAN/RADAR SIDOARJO

TINGKATKAN PELAYANAN: Lokasi pembangunan RSUD Sedati berdampingan dengan Puskesmas Sedati.

Bangun RSUD Sedati, Target Rampung Akhir 2025

SEDATI-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memulai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati dalam waktu dekat. Fasilitas kesehatan baru ini akan dibangun di bekas lahan Puskesmas Sedati lama, tepat di belakang gedung puskesmas yang masih aktif saat ini.

RSUD Sedati dirancang sebagai rumah

sakit kelas D, dengan target penyelesaian pada Desember 2025. Saat ini, proses konstruksi telah memasuki tahap awal.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakshmie Herawati Yuwantina, menjelaskan bahwa kontrak kerja dengan pelaksana proyek telah ditandatangani pada pertengahan Juli lalu.

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun RSUD Sedati,...

“Pembangunan ini akan berlangsung selama sekitar 150 hari kerja dengan anggaran mencapai Rp60 miliar,” ujarnya pada Minggu (20/7).

Menurut Lakshmie, pembangunan RSUD Sedati merupakan bagian dari rencana jangka panjang Pemkab Sidoarjo dalam memperluas akses layanan kesehatan. Studi kelayakan proyek ini telah dilakukan sejak 2019 dan diperbarui pada 2023.

“Secara kuantitas, rumah sakit di Sidoarjo sudah cukup. Namun dari sisi distribusi, wilayah Sedati masih kekurangan fasilitas layanan kesehatan sekunder,” jelasnya.

RSUD Sedati akan dibangun dalam bentuk gedung tiga lantai dan menyediakan 50 tempat tidur sesuai standar rumah sakit tipe D. Layanan medis yang disiapkan mencakup empat spesialisasi dasar: anak, bedah, penyakit dalam, dan kebidanan.

Fasilitas pendukung lainnya antara lain UGD, rawat inap, laboratorium, radiologi, farmasi, kamar operasi, laundry, dan CSSD (Central Sterile Supply Department).

Saat mulai beroperasi, RSUD Sedati akan didukung oleh 50 hingga 100 tenaga kesehatan, disesuaikan dengan kebutuhan minimum layanan awal.

Namun, Lakshmie menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah penyelesaian fisik bangunan sesuai jadwal. “Pembangunan harus tuntas tepat waktu agar bisa segera difungsikan,” tegasnya.

Kehadiran RSUD Sedati diharapkan dapat memperkuat sistem rujukan berjenjang, mulai dari puskesmas ke RSUD Sedati, hingga ke RSUD Sidoarjo atau rumah sakit kelas A lainnya.

“Kalau rumah sakit swasta bisa membentuk holding, pemerintah juga harus bisa. Ini penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” pungkas Lakshmie. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



21 Komunitas Ramaikan Parade Teater Sidoarjo

SIDOARJO - Sebanyak 21 komunitas teater tampil dalam gelaran Parade Teater Sidoarjo #2 yang digelar Dewan Kesenian Sidoarjo (Dekesda). Di puncak

acara kemarin (20/7), ada 14 pertunjukan teater modern disuguhkan oleh para pelajar asal Kota Delta dan komunitas umum di panggung terbuka Dekesda Art Centre.

Mengangkat tema *Dardanella: Legacy of Theatre*, acara ini menjadi ruang ekspresi sekaligus pelestarian warisan teater legendaris Dardanella asal Sidoarjo.

Ketua Komite Teater Dekesda Sidoarjo Jeffrey Dio Firmansyah mengatakan, tahun ini merupakan gelaran kedua dengan melibatkan 21 komunitas teater dari berbagai wilayah di Sidoarjo. "Kami ingin memperkuat kebanggaan terhadap Dardanella dan memberi ruang bagi generasi muda untuk berkarya dalam teater yang lebih modern," ujarnya kemarin (20/7). (eza/uzi)

TAHUN KEDUA:
Teater Gending SMA YPM 2 Sukodono menampilkan pertunjukan teater berjudul *Twinkle Twinkle Little Star* di acara Parade Teater #2 Sidoarjo di Dekesda Art Centre kemarin (20/7).

Jawa Pos

Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan Jual-Beli Tanah Kavling di Pabean

Sudah Lunas,
Tak Dapat
Dokumen Jual Beli

SIDOARJO - Ratusan orang menjadi korban dugaan penipuan jual beli tanah kavling di Dusun Alas Tipis, Desa Pabean, Kecamatan Sedati. Tanah tersebut dipasarkan PT Makmur Tentram Berprestasi (MTB) Property sejak 2022 dengan nama proyek Mutiara Alas Tipis. Korban merugi puluhan hingga ratusan juta. Salah satu korban mengaku merugi ratusan juta. "Saya membeli dua unit kavling seluas 5x10 meter dengan harga Rp 145 juta per unit secara kredit *inhouse*. Namun hingga kini, tak ada tanda-tanda pembangunan maupun pengurusan seperti yang dijanjikan," kata Fatimatuzzahro, salah satu korban, kemarin (20/7).

Warga asal Gedangan itu mencicil selama 15 bulan dengan pembayaran sebanyak Rp 3,9 juta per bulan. Dana kemudian mengajukan pembatalan setelah melihat tidak ada progres. Ima, sapaan akrabnya, mengajukan *refund* 60 persen sesuai perjanjian dengan pengembang.

"Kata mereka mau mulai

dibayar Mei 2025. Sampai sekarang belum ada yang cair," ujarnya. Sementara itu, Hendra Sabiantara, mengalami hal serupa. Warga Gedangan itu sempat percaya karena pengembang mengklaim telah memiliki SK Gubernur dan tanah siap bangun. Bahkan Hendra sudah dua tahun mencicil, tetapi sertifikat tanah belum juga diterbitkan.

Ia bahkan menemukan bahwa sebagian tanah yang dijual belum lunas dibeli oleh pengembang dari ahli waris. "Jadi tanah yang kami beli belum atas nama mereka," tuturnya. Setiap kali pihak pengembang ditanya, Hendra menyebut pengembang tidak

bisa menunjukkan alas hak tanah yang dijual. Sedangkan saat ditanya soal progres pengurusan surat dan legalitas, pihak pengembang selalu melempar ke bagian legal dan staf dan beralasan terganjal peraturan desa.

Selain Ima dan Hendra, ada beberapa korban lain yang bahkan telah membayar lunas dua unit kavling seharga total Rp 214 juta. Namun setelah pelunasan, permintaannya atas dokumen Ikatan Jual Beli (IJB) tak pernah dipenuhi pihak pengembang. "Tidak ada pengurusan, tidak ada progres. Hanya janji terus," keluh Jafran, salah satu korban lainnya. Dia menyebut, ada 100 lebih yang juga jadi korban. **(eza/uzi)**



Jadi tanah yang kami beli ternyata belum atas nama mereka. Sebagian belum lunas dibeli oleh pengembang dari ahli waris."

HENDRA SABYANTARA
Salah satu korban



BERPOLEMIK: Kawasan proyek tanah kavling milik PT Makmur Tentram Berprestasi (MTB) Property di Dusun Alas Tipis, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, kemarin (20/7). Pembeli tak kunjung mendapatkan tanah kavling meski sebagian sudah lunas.

DUGAAN PENIPUAN JUAL BELI KAVLING

- Banyak pembeli mengeluh tak kunjung ada pengurusan
- Pembeli yang lunas belum mendapat dokumen ikatan jual beli
- Kerugian korban mulai dari puluhan hingga ratusan juta
- Tanah yang dijual belum lunas dibeli oleh pengembang dari ahli waris
- Dinas Perkim CKTR sebut pengembang tidak tercantum dalam pengajuan rill tapak
- Pengembang ungkap tidak ada sengketa dengan ahli waris dari tanah kavling yang dijual

SUMBER: CIVIL AH DARI BERAGAI SUMBER

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kurniawan Yuda Soesanto

Pengembang: Tanah Tidak dalam Sengketa

DIREKTURUtama PT MTB Property, Kurniawan Yuda Soesanto mengakui bahwa lahan yang dijual memang belum atas nama perusahaan. Namun, ia mengklaim proses pembelian dengan ahli waris sudah dilakukan melalui termin pembayaran dan perjanjian

yang diketahui notaris.

"Tanah itu tidak dalam sengketa, kami beli langsung dari ahli waris. Proses pembelian berjalan, meski memang belum lunas," katanya. Ia juga mengaku bahwa pihaknya pernah mengajukan izin, termasuk ril tapak ke Pemkab

Sidoarjo, namun pengurusan dilakukan oleh bagian legal perusahaan. "Sudah diajukan lama, saya lupa tahunnya," jelasnya.

Terkait polemik dengan para pembeli kavling, Yuda menyebut ada persoalan internal. Ia menuding oknum

notaris perusahaan melakukan pemalsuan IJB dan kini sudah diberhentikan. "Mediasi sudah dilakukan di desa, dan kami diarahkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus SK Gubernur serta pembaruan perjanjian dengan ahli waris," tuturnya. **(eza/uzi)**

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Lima Pasar Tradisional Diperbaiki mulai Agustus sampai Desember

SIDOARJO - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo akan merehabilitasi lima pasar tradisional tahun ini. Yakni Pasar Gedangan, Pasar Taman, Pasar Wadungasti, Pasar Prambon, dan Pasar Bulang.

Kabid Pasar Disperindag Sidoarjo Sulton Hasan mengatakan, hanya rehabilitasi ringan dan pemeliharaan.

"Tidak ada rehab total, hanya perbaikan fasilitas," ujarnya kemarin (20/7).

Rehab pasar akan menggunakan anggaran dari APBD 2025 dengan nilai bervariasi antara Rp 499 juta hingga Rp 699 juta. Tergantung kebutuhan perbaikannya. Pekerjaan direncanakan antara Agustus hingga September 2025. Tuntas pengerjaan pada Desember.

"Kami akan benahi seperti atap, drainase, kios, dan sarana umum lainnya. Parkir juga," jelasnya. Dari lima proyek tersebut, nilai tertinggi tercatat untuk rehabilitasi Pasar Prambon, yakni sebesar Rp 699,9 juta. "Saat ini, semua paket masih dalam proses evaluasi administrasi, dan kualifikasi," katanya. (eza/uzi)



MASUK LELANG REHABILITASI: Suasana di Pasar Gedangan, kemarin (20/7). Pasar tersebut akan diperbaiki mulai akhir Agustus mendatang.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Ingatkan Pentingnya Pemerataan Infrastruktur dan Kualitas Pendidikan



Foto : Ketua Komisi D, Dhamroni Chudlori (dok).

SIDOARJOSATU.COM — Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori mengingatkan pentingnya pemerataan infrastruktur dan kualitas pendidikan di Sidoarjo. Dalam pandangannya, kebijakan zonasi maupun sistem domisili dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hanya akan efektif jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai di setiap wilayah.

“Kalau infrastrukturnya belum sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya, ya sistem apapun tidak akan berjalan ideal,” tegas Dhamroni, Jumat (18/7/2025).

Ia menilai, sistem zonasi seharusnya tidak diterapkan secara seragam bila kondisi geografis dan fasilitas pendidikan di daerah masih timpang. Legislator dari Fraksi PKB ini bahkan menyarankan agar setiap kecamatan minimal memiliki dua sekolah negeri yang layak agar akses pendidikan lebih merata.

“Pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan setiap kecamatan punya minimal dua sekolah negeri,” katanya.

Di tengah dominasi beberapa sekolah negeri unggulan, Dhamroni juga menyoroti munculnya stigma negatif terhadap sekolah-sekolah di wilayah pinggiran. Hal ini, menurutnya, tidak lepas dari ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan kepala sekolah yang berkualitas.



“Sudah saatnya hilangkan stigma sekolah negeri favorit. Semua harus disamaratakan lewat distribusi guru dan kepala sekolah berkualitas,” ujarnya.

Menurutnya, selama pemerintah belum mampu mendistribusikan kualitas yang setara antar sekolah negeri, maka ketimpangan dan rebutan masuk sekolah “favorit” akan terus terjadi. Ia menekankan bahwa transformasi pendidikan harus dimulai dari pemerataan kualitas sumber daya manusia.

Imbas ke Sekolah Swasta

Selain berdampak pada sekolah negeri, Dhamroni juga menilai bahwa kebijakan zonasi dan dominasi sekolah negeri yang diperluas tanpa perhitungan juga bisa mematikan peran sekolah swasta yang selama ini menjadi alternatif pendidikan masyarakat.

“Kalau semua dikejar negeri dan negeri ditambah terus, maka sekolah swasta bisa kukut. Nah, inilah yang juga harus jadi perhatian,” jelasnya.

Dalam pandangannya, kebijakan pendidikan seharusnya tidak dilakukan secara parsial. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pusat harus sinkron dengan kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran maupun infrastruktur dasar.

“Kebijakan apapun harus dilandasi pemenuhan infrastruktur. Pemerintah pusat sampai daerah harus sinkron. Jangan gegabah mengeluarkan kebijakan sebelum dapurnya siap,” tutupnya. (Had).





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Penolakan LKPj Bupati Subandi Oleh DPRD Sidoarjo Bisa Menjadi Bola Liar



Dr. Jamil, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

SIDOARJO (RadarJatim.id) – Suhu politik di Kabupaten Sidoarjo terus memanas dan seakan-akan tidak bisa dipadamkan, karena pihak-pihak yang bertikai tidak juga menurunkan egonya masing-masing.

Panasnya suhu politik pertama kali muncul dengan statemennya H. Bupati Sidoarjo terkait statemennya yang mengatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menghambur-hamburkan uang.

Sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo meradang dengan menuntut Bupati Subandi untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka melalui media online serta media sosial (medsos).



Bupati Subandi sudah meminta maaf secara terbuka, namun permintaan maaf itu dianggap tidak tulus dan ikhlas sehingga beberapa kali rapat Pandangan Akhir (PA) fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo 2024 tidak memenuhi kuorum.

Beberapa kali rapat paripurna PA fraksi-fraksi yang tidak kuorum itu disambut Bupati Subandi dengan mengatakan akan mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Peraturan Daerah (Perda) LKPj 2024.

Ternyata statemen Bupati Subandi yang akan mengeluarkan Perkada itu tidak mampu mendinginkan suasana, bahkan semakin menyulut kemarahan sebagian besar anggota DPRD Sidoarjo.

Puncaknya pada rapat paripurna tanggal 16 Juli 2025 lalu, ada 5 fraksi di DPRD Sidoarjo yang menyatakan menolak dan 2 fraksi yang menyatakan menerima dengan catatan LKPj Bupati Sidoarjo 2024.

Bahkan ada 7 partai politik (parpol) yang akhirnya membuat koalisi baru dengan nama Koalisi Sidoarjo Maju, yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, NasDem, PKS, PPP dan PDI-P.

Dr. Jamil, SH, MM, Ahli Hukum Tatanegara dari Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya mengatakan bahwa adanya implikasi hukum maupun politik atas penolakan tersebut, Minggu (20/7/2025).

“Secara sederhana LKPj merupakan laporan kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Laporan ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah dan wajib dilaporkan kepada DPRD (Sidoarjo, red) melalui sidang paripurna,” katanya.

LKPj akan diformalkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) manakala proses pembuatannya sudah terpenuhi semua. Namun, apabila Raperda yang berisi LKPj tersebut ditolak dalam pembicaraan tingkat 2 atau tingkat pengesahan.

“Maka, Reperda itu tidak dapat dibahas kembali dalam masa sidang tersebut. Raperda itu hanya dapat dibahas kembali dalam masa sidang berikutnya,” tambahnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dosen Fakultas Hukum Ubhara Surabaya tersebut menyampaikan bahwa LKPj merupakan dokumen wajib yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Serta diatur secara khusus dengan 3 produk hukum pemerintah pusat, yaitu di Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020.

Bahkan bagi Pemda yang tidak menjalankan kewajiban memberikan LKPj diberikan kewenangan kepada DPRD, sesuai dengan tingkatannya untuk menggunakan hak interplasinya sebagaimana termaktub dalam pasal 73 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Penolakan LKPj ini tidak bisa dianggap *enteng*. Secara politik, dia bisa menjadi bola liar yang akan terus menggelinding. Dan, bukan tidak mungkin bergerak kearah penggunaan hak-hak DPRD, seperti hak interplasi, hak angket hingga hak menyatakan pendapat,” terangnya. (mams)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Mantapkan Langkah Menuju FORNAS VIII 2025 di NTB, KORMI Sidoarjo Gelar Pemusatan Latihan dan Pembekalan Kontingen



Sidoarjo (republikjatim.com) – Selangkah lagi menuju perhelatan akbar Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII 2025 di NTB, pada tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 2025. KORMI Sidoarjo yang tidak pernah absen mengikuti FORNAS mulai FORNAS II Jateng Tahun 2013, kali ini kembali turun ke arena lomba.

Bahkan, Squad KORMI Kabupaten Sidoarjo akan memperkuat KORMI Provinsi Jatim merebut gelar juara.

Untuk mengecek persiapan akhir pegiat dan memperkuat kerja sama tim, KORMI Kabupaten Sidoarjo menggelar Pemusatan Latihan dan Pembekalan Kontingen KORMI Kabupaten Sidoarjo FORNAS VIII NTB, Sabtu (19/07/2025). Kegiatan itu dipusatkan di Gedung Delta Graha Pemkab Sidoarjo. Acara ini diikuti 245 atlet dari 27 Inorga.



Ketua Umum KORMI Kabupaten Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto dalam arahannya mengatakan agar sesama tim harus menjaga kekompakan dan kebersamaan.

"Kalau sudah selesai tanding tolong menjadi supporter yang lain. Kebersamaan harus kita jaga selama pertandingan," ujar mantan Wabup Sidoarjo yang akrab disapa Pak Tjip ini.



Selain itu, Pak Tjip menjelaskan teknis keberangkatan dan merinci 245 orang kontingen KORMI Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak, 146 orang yang terdiri dari pegiat (atlet), pelatih, official Inorga, official KORMI Sidoarjo dan dokter, dibiayai menggunakan dana hibah. Sedangkan 99 pegiat berangkat dengan biaya mandiri.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Kontingen KORMI Kabupaten Sidoarjo dijadwalkan dilepas Bupati Sidoarjo pada tanggal 23 Juli 2025 di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo," ungkapnya.



Menutup arahnya, Pak Tjip menekankan agar kontingen KORMI Kabupaten Sidoarjo terus berkomunikasi dengan baik.

"Bahkan harus bisa menjaga nama harum Kabupaten Sidoarjo dan bisa memenuhi target emas," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kontingen KORMI Kabupaten Sidoarjo, Untung Suhardjo memastikan target emas yang ditetapkan masing-masing Inorga dan jenis olahraga (Jenor) yang diikuti. Dalam pemusatan latihan itu seluruh Inorga KORMI Kabupaten Sidoarjo memasang total target 79 medali emas dari 91 Jenor.



"Saya sebagai Ketua Kontingen sangat optimis. Saya akan ikuti (FORNAS) sampai habis, sesuai target harus mendapatkan 79 emas. Kami mengingatkan agar para pegiat menghormati pelatih dan berbuat yang terbaik untuk Sidoarjo," pungkasnya. Ary/Waw





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Resmikan Koperasi Merah Putih Desa Kupang, Khofifah : Koperasi Merah Putih Harus Jadi Mitra Strategis UMKM



Gubernur Jatim, Hj. Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan Koperasi Merah Putih di Desa Kupang, Kecamatan Jabon.

SIDOARJO (RadarJatim.id) – Keberadaan Koperasi Merah Putih di desa-desa tidak boleh mematikan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah ada. Justru keberadaan Koperasi Merah Putih harus bisa menjadi mitra strategi, dan bahkan bisa berperan sebagai distributor produk UMKM lokal.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim), Hj. Khofifah Indar Parawansa usai meresmikan Koperasi Merah Putih di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Sabtu (19/7/2025) pagi.

“Koperasi Merah Putih, jangan sampai menjadi kompetitor pelaku UMKM di desa. Kalau bisa, justru menjadi mitra strategis. Bahkan distributor bagi produk-produk UMKM,” sampainya.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi sinergisitas antara Koperasi Merah Putih, Badan Urusan Logistik (Bulog), PT. Pos Indonesia serta dukungan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam membangun ekosistem ekonomi desa. Model kemitraan seperti ini bisa menjadi percontohan nasional.



“Bulog sudah men-*deploy* beras, gula dan minyak goreng. Harganya dibawah HET (Harga Eceran Tertinggi, red). Dan, ini bisa dibeli oleh pelaku toko kelontong di sekitar koperasi. Jadi bukan saling menyaingi, melainkan saling dukung,” terangnya.

Diungkapkan oleh Khofifah Indar Parawansa bahwa Koperasi Merah Putih Desa Kupang sudah siap beroperasi, meski belum termasuk dalam koperasi yang akan diluncurkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), tetap akan menjalankan fungsinya secara maksimal.

Gubernur Jatim dua periode itu mengungkapkan bahwa ada sebanyak 9 Koperasi Merah Putih di Jatim yang telah terkonfirmasi dan akan diluncurkan oleh Presiden RI dalam waktu dekat.

“Ini (Koperasi Merah Putih Desa Kupang, red) tidak termasuk yang akan diluncurkan, sudah siap. Jadi yang akan diluncurkan, tentu lebih lengkap lagi komoditas-komoditasnya,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi kepengurusan Koperasi Merah Putih Desa Kupang yang menempatkan dirinya sebagai mitra bagi pelaku UMKM dan toko-toko kelontong disekitarnya.

Koperasi Merah Putih bisa menjadi agen bagi pelaku UMKKM dan toko-toko kelontong disekitarnya. Karena harganya dibawah HET, terutama beras, gula dan minyak goreng.

“Jangan sampai pelaku UMKM merasa galau atau resah. Pengurus koperasi di Kupang Jabon ini sudah sangat arif dalam membangun hubungan kemitraan dengan toko-toko disekitarnya,” ucapnya.

Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih yang siap beroperasi perlu dilengkapi dengan gudang dan sistem administrasi yang sesuai dengan standar Bulog.

Pelatihan dan pendampingan pun akan terus dilakukan agar Koperasi Merah Putih benar-benar siap menjalankan peran strategisnya dalam menopang ketahanan pangan dan ekonomi desa.

“Kita sedang berproses. Dan, proses ini perlu sosialisasi yang komprehensif. Tapi, Alhamdulillah gudang disini sudah siap. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, termasuk BRI, Bulog, PT. Pos (Indonesia, red) dan seluruh pengurus koperasi,” tuturnya.

Ia juga menyebut bahwa PT. Pos Indonesia, kedepannya akan membuka gerai-gerai Koperasi Merah Putih desa/kelurahan untuk memperkuat distribusi pangan murah ke masyarakat.

“Visi besar Presiden Prabowo membangun ekonomi dari desa harus kita dukung bersama. Koperasi menjadi ujung tombak untuk penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya. (mams)

